

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kelembagaan terkait kegiatan sektor perikanan yang ada di Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menggunakan tiga analisis yaitu: sistem regulasi, organisasi yang terlibat, dan hubungan antar aktor.

Regulasi daerah tentang konsep kelembagaan petani/ nelayan masih berada pada tataran ide dan belum menyentuh proses praksis. Kelembagaan petani/ nelayan dipandang sebagai sebuah wadah kosong yang hanya digunakan sebagai pemanis dalam menjalankan program pemerintah dan belum menyentuh kondisi masyarakat akar rumput di Kabupaten Banggai Kepulauan. Masih banyak pelaku, pebisnis hingga nelayan kecil yang saling salah persepsi tentang keberadaan kelembagaan petani/ nelayan karena regulasi yang digunakan belum menyentuh apa yang mereka butuhkan. Kebijakan yang ada berkaitan dengan kegiatan kelembagaan petani/ nelayan hanya sebatas untuk menjalankan program kegiatan yang dibuat pemerintah dan bersifat sementara serta hanya dilaksanakan oleh pihak tertentu. Untuk itu, regulasi hukum diharapkan menghasilkan sebuah mekanisme atau pedoman yang menuntun para pengguna untuk bekerja lebih baik, terarah dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan baik di tingkat nelayan, masyarakat kelautan lainnya, birokrasi maupun para pembuat kebijakan.

Dalam mendukung kegiatan masyarakat sektor perikanan di Kabupaten Banggai Kepulauan, telah ditunjang oleh keberadaan kelembagaan baik kelembagaan formal (Pemerintah) yang meliputi **Dinas Kelautan dan Perikanan**, dimana organisasi ini merupakan leading sektor penggerak kegiatan sektor perikanan yang berperan sebagai provider, regulator, planner, dan fasilitator guna menunjang kegiatan masyarakat sektor perikanan. Disamping itu, **Bappeda** sebagai badan perencana dan penyedia data juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan kelembagaan sektor perikanan, **BKP3** juga

merupakan organisasi pendukung kegiatan masyarakat sektor perikanan, dimana peran dari organisasi ini yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan penyedia informasi. Kelembagan non formal yang terlibat dalam kegiatan sektor perikanan pada wilayah penelitian yaitu: **Kelompok tani/ nelayan** yang pembentukannya sebagian besar didasarkan karena adanya proyek bantuan dari pemerintah dan dibentuk oleh kelompok atau orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu sehingga keberadaan kelompok ini belum dapat meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan petani. Pada wilayah penelitian terdapat **kelompok simpan pinjam perempuan (SPP)** yang merupakan salah satu organisasi yang berperan dalam memberikan modal usaha kepada masyarakat yang ada di tingkat desa, walaupun pinjaman modal yang diberikan cukup terbatas namun keberadaan kelompok ini cukup membantu masyarakat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapatnya tumpang tindih penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat/ kelompok hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar instansi yang berkepentingan dan tidak didukung oleh data yang akurat juga minimnya sosialisasi langsung kepada masyarakat/ kelompok. Disamping itu, orientasi pembangunan yang hanya menonjolkan sarana fisik tanpa mengaitkan dengan faktor kemanfaatan sehingga kurang berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat setempat menyebabkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tidak berdaya guna.

Disamping itu, belum adanya hubungan yang terorganisir serta mampu menciptakan suatu keteraturan antara individu yang tergabung dalam suatu kelompok pembudidaya sehingga sudah terbentuk banyak kelompok pembudidaya namun tidak ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kegiatan hanya dilakukan secara individu. Hubungan antara pembudidaya dengan pemerintahpun jarang dilakukan, dalam hal ini pemerintah hanya melakukan hubungan dengan aparat desa dalam hal pendataan. Hubungan yang sering terjadi hanya antara pembudidaya dengan pedagang berkaitan dengan kebutuhan modal oleh pembudidaya hal ini dikarenakan pembudidaya mengalami kendala dalam mendapatkan modal usaha pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi ini diperuntukkan kepada pihak- pihak yang terkait langsung, khususnya Dinas Kelautan dan perikanan, BKP3, Bappeda, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok tani sebagai pemegang peran penting dalam pengembangan lembaga non formal dalam meningkatkan produktivitas diwilayah setempat.

- Perlu peningkatan hubungan koordinasi antara stakeholder yang berwenang tersebut melihat bahwa kecamatan Liang cukup potensial dalam pengembangan kegiatan pembudidayaan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan serius dari pihak pemerintah dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya di kecamatan Liang.
- Mensinkronisasikan peraturan- peraturan yang digunakan sebagai pedoman masing- masing organisasi yang terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat sektor perikanan sehingga terbentuk kesesuaian antara peraturan satu dengan yang lainnya dan dapat meminimalkan kesalahan serta tumpang tindih kepentingan.
- Peningkatan kualitas kinerja dengan menambah personil penyuluh perikanan sehingga kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara rutin kepada masyarakat.
- Pendataan kembali kelembagaan petani/ nelayan yang sudah ada
- Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang manfaat kelembagaan petani/ nelayan
- Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat untuk menghidupkan kembali peran koperasi yang ada pada wilayah penelitian.
- Menerapkan aturan main untuk disepakati bersama dan membangun kesadaran petani/ nelayan mengenai pentingnya aktivitas kolektif dalam hal pemasaran dalam meningkatkan kesejahteraan petani/ nelayan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

- Narasumber penelitian yang sebenarnya diinginkan dalam penelitian ini mayoritas pejabat eselon II untuk kelembagaan pemerintah tetapi pada kenyataannya di lapangan, pejabat- pejabat pada level tersebut sangat sulit

untuk ditemui disebabkan kesibukan atas pekerjaan mereka masing-masing yang sangat padat dan menyita waktu.

- Keterbatasan data sekunder yang dimiliki baik oleh organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang disebabkan oleh adanya pergantian pejabat yang menangani suatu bidang. Oleh sebab itu analisis dilakukan dengan lebih mengandalkan data primer.